

333 Perda Diskriminasi Perempuan

MASIH banyak pemerintah daerah (pemda) menjalankan pemerintahan dan membuat aturan tanpa berpedoman pada beberapa aturan pemerintah pusat terkait dengan upaya melindungi dan meningkatkan kesempatan bagi perempuan.

Bahkan, sedikitnya terdapat 333 peraturan daerah (perda) yang dibuat mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Professor Musdah Mulia, diskriminasi terhadap perempuan memang masih terjadi di berbagai bi-

dang hingga memasuki 20 tahun reformasi. Beberapa kemajuan memang terlihat pada birokrasi dan undang-undang, tetapi implementasinya belum berdampak maksimal.

"Dua puluh tahun indeks demokrasi Indonesia ini belum membaik. Dalam hal perempuan, belum ada peningkatan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua sektor birokrasi," katanya dalam Refleksi 20 Tahun Reformasi di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, berbagai keputusan yang diambil belum mengarah pada pengarusutamaan gender. Bahkan,

meski pada beberapa bidang perempuan menjadi aktor utama atau perwakilan, belum tentu mereka mau bersuara untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Sementara itu, pendiri Institut KAPAL Perempuan Misiyah Misi mengatakan, dalam masa reformasi Indonesia memang mengalami beberapa kemajuan di tataran kebijakan. Antara lain, dengan adanya Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Namun, isu perempuan atau isu-isu gender masih terus tertinggal akibat budaya patriarki

yang mengakar. "Tantangan ke depan, bagaimana gerakan perempuan bisa menjawab kembali krisis ini. Ke depan, jika tidak ada upaya bersama yang lebih serius, gerakan perempuan akan kian sulit dan parah," katanya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ujarnya, dibutuhkan kerja keras semua pihak, termasuk media, dan tidak hanya oleh pemerintah dan aktivis. Ia berharap media lebih mau bergerak mengangkat isu perempuan. Sensitivitas terhadap berbagai hal terkait dengan isu perempuan juga harus terus ditingkatkan karena media memiliki pengaruh besar. (Pro/H-1)